

## Dari Rasional ke Kompleks: Tinjauan Literatur tentang Model-Model Analisis Kebijakan Pendidikan

Yuyun Tobondo\*<sup>1</sup>, Sepryanus RP Tudjuka<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Prodi Pendidikan Matematika, FKIP, Universitas Kristen Tentena

<sup>2</sup> Prodi PG-PAUD, FKIP, Universitas Kristen Tentena

\*email: [alfa.trumpp@gmail.com](mailto:alfa.trumpp@gmail.com)

### ABSTRACT

*This study explored the evolution of educational policy analysis models through a qualitative literature review, focusing on the transition from rational to complex approaches. The research employed a deductive method, systematically analyzing secondary sources such as academic journals and policy documents. The analysis examined the social, economic, and political dimensions influencing educational policy in Indonesia. The rational model, characterized by logical and evidence-based decision-making, was effective for measurable outcomes but limited in addressing local disparities and dynamic contexts. Conversely, the complex model, which integrated participatory and adaptive strategies, proved responsive to global challenges like globalization and local needs such as decentralization. The findings reveal that the complex model better accommodates the interplay of social, economic, and political factors, promoting inclusive and equitable education policies. The study concludes that a holistic, interdisciplinary approach is essential for effective policy formulation in Indonesia's diverse educational landscape. Recommendations include enhancing stakeholder participation, improving communication mechanisms, prioritizing equitable resource allocation, and integrating critical pedagogy principles.*

**Keywords** : Complex Model, Educational Policy, Policy Analysis, Rational Model, Stakeholder Participation

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji evolusi model analisis kebijakan pendidikan melalui pendekatan studi pustaka kualitatif, dengan fokus pada peralihan dari model rasional ke model kompleks. Penelitian menggunakan metode deduktif, menganalisis sumber sekunder seperti jurnal akademik dan dokumen kebijakan secara sistematis. Analisis mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan politik yang memengaruhi kebijakan pendidikan di Indonesia. Model rasional, yang berfokus pada pengambilan keputusan logis dan berbasis bukti, efektif untuk hasil terukur namun terbatas dalam menangani ketimpangan lokal dan konteks dinamis. Sebaliknya, model kompleks, yang mengintegrasikan strategi partisipatif dan adaptif, lebih responsif terhadap tantangan global seperti globalisasi dan kebutuhan lokal seperti desentralisasi. Temuan menunjukkan bahwa model kompleks lebih mampu mengakomodasi interaksi faktor sosial, ekonomi, dan politik, mendorong kebijakan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Penelitian menyimpulkan bahwa pendekatan holistik dan interdisipliner sangat penting untuk perumusan kebijakan yang efektif di lanskap pendidikan Indonesia yang beragam. Rekomendasi mencakup peningkatan partisipasi pemangku kepentingan, perbaikan mekanisme komunikasi, prioritas alokasi sumber daya yang adil, dan integrasi prinsip pedagogi kritis.

**Kata Kunci** : Analisis Kebijakan, Kebijakan Pendidikan, Model Kompleks, Model Rasional, Partisipasi Pemangku Kepentingan

### PENDAHULUAN

Kebijakan pendidikan merupakan panduan formal dan informal, undang-undang, serta strategi yang ditetapkan untuk mengatur dan meningkatkan fungsi sistem pendidikan secara keseluruhan (Yeşilbaş-Özenç, 2025). Dalam konteks ini, analisis kebijakan

pendidikan menjadi proses sistematis yang melibatkan perumusan, implementasi, dan evaluasi hasil kebijakan tersebut, yang tidak hanya bersifat teknis tetapi juga dinamis serta saling terkait dengan konteks sosial, ekonomi, dan politik (Yeşilbaş-Özenç, 2025). Secara umum, kebijakan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari dinamika masyarakat, di mana perspektif sosial, ekonomi, dan politik memengaruhi implementasi dan efektivitasnya. Misalnya, kondisi ekonomi suatu daerah sangat memengaruhi akses pelatihan dan sumber daya bagi pendidik, seperti yang terlihat dalam ketidakmerataan penerapan Kurikulum 2013 di Kota Bandung dan Yogyakarta (Krisna, 2020). Selain itu, faktor ekonomi berkontribusi signifikan dalam menentukan kebijakan yang lebih inklusif, terutama bagi siswa yang menghadapi kesulitan finansial (Novrian et al., 2024). Dari perspektif sosial, kepala sekolah dan guru memiliki tanggung jawab untuk menyesuaikan kebijakan dengan konteks lokal, sementara ketimpangan akses seperti jaringan internet selama pandemi memperburuk kondisi pembelajaran (Rosyada et al., 2021; Siska & Rudagi, 2021). Sementara itu, dimensi politik menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan sering kali mencerminkan kebijakan publik yang lebih luas, seperti fokus pada keselamatan selama pandemi Covid-19 daripada standar akademik (Nurkamiden, 2021), dan dipengaruhi oleh interaksi faktor politik, sosial, serta ekonomi (Kholifah et al., 2022).

Dalam evolusi metodologi analisis kebijakan pendidikan, terdapat pergeseran dari pendekatan rasional yang logis dan berbasis bukti menuju model yang lebih kompleks dan dinamis. Model rasional menekankan keputusan optimal berdasarkan informasi yang ada, seperti dalam perancangan kebijakan untuk mencapai hasil yang dapat diukur (Krisna, 2020). Namun, pendekatan ini mulai bergeser ke model kompleks yang mempertimbangkan interaksi berbagai faktor eksternal, termasuk dinamika sosial dan politik yang saling berpengaruh (Kholifah et al., 2022; Nanti & Fadriati, 2023). Kajian literatur menunjukkan bahwa analisis kebijakan pendidikan harus interdisipliner, melibatkan dimensi sosial seperti partisipasi masyarakat (Luthfi & Septiyanti, 2023), dimensi ekonomi untuk mengatasi ketimpangan (Yusrina et al., 2024; Edison & Andriansyah, 2023), dan dimensi politik yang memengaruhi struktur kekuasaan (Sulistiyarningsih & Handayani, 2022). Evolusi ini juga tercermin dalam model-model seperti model kelembagaan, sistem, elit, dan implementasi kebijakan publik, yang semakin berfokus pada pendekatan partisipatif dan adaptif terhadap konteks lokal serta global (Marsari et al., 2021; Sofiani et al., 2024).

Meskipun demikian, tinjauan literatur yang sistematis tentang transisi dari model rasional ke kompleks dalam analisis kebijakan pendidikan masih diperlukan untuk menyediakan kerangka komprehensif yang berbasis pada prinsip keadilan sosial, kesetaraan, dan etika, serta independen dari pengaruh ideologi politik (Yeşilbaş-Özenç, 2025). Pendekatan studi pustaka menjadi metode yang efektif untuk menggali pola, temuan, dan metodologi dari literatur yang ada, seperti yang ditekankan dalam kajian tentang revitalisasi pendidikan (Radiyah, 2024) dan implementasi kebijakan (Sanusi, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan literatur tentang model-model analisis kebijakan pendidikan, dengan fokus pada evolusi dari pendekatan rasional ke kompleks, guna memberikan wawasan mendalam bagi pembuat kebijakan dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*), yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan menyusun tinjauan literatur secara sistematis tentang evolusi model-model analisis kebijakan pendidikan dari pendekatan rasional ke kompleks. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan sifat penelitian yang berfokus pada analisis dokumen dan literatur sekunder, tanpa melibatkan pengumpulan data primer dari lapangan. Studi pustaka menjadi metode yang krusial untuk menggali pola, temuan, serta metodologi yang telah digunakan dalam analisis kebijakan pendidikan, sebagaimana ditekankan oleh Assyakurrohim et al. (2022) yang menyoroti pentingnya pendekatan ini dalam merangkum sumber-sumber relevan secara kritis dan menyeluruh.

Data dikumpulkan melalui pencarian literatur secara sistematis dari berbagai sumber sekunder, termasuk jurnal ilmiah, buku, dan dokumen kebijakan terkait. Prosedur pengumpulan data dimulai dengan identifikasi kata kunci utama seperti "model analisis kebijakan pendidikan", "model rasional", "model kompleks", "tinjauan literatur", dan kombinasi dengan istilah terkait seperti "perspektif sosial, ekonomi, dan politik" serta "kebijakan pendidikan di Indonesia". Pencarian dilakukan pada basis data akademik seperti Google Scholar, JSTOR, dan repository lokal Indonesia, dengan rentang waktu publikasi dari tahun 2015 hingga 2024 untuk memastikan relevansi dan aktualitas. Kriteria inklusi meliputi: (1) literatur yang secara spesifik membahas model analisis kebijakan pendidikan, termasuk transisi dari rasional ke kompleks; (2) sumber yang berfokus pada konteks Indonesia atau internasional yang relevan; dan (3) publikasi *peer-reviewed* atau dokumen resmi. Kriteria eksklusi mencakup literatur non-akademik, opini non-referensial, atau yang tidak berhubungan langsung dengan topik. Jumlah literatur awal yang dikumpulkan sekitar 50 sumber, yang kemudian disaring menjadi 30 sumber utama berdasarkan relevansi, seperti yang tercantum dalam referensi dokumen (misalnya, Krisna, 2020; Novrian et al., 2024; Rosyada et al., 2021; dan Yeşilbaş-Özenç, 2025).

Pengumpulan data juga melibatkan analisis dokumen yang ada, seperti kajian literatur tentang perspektif sosial, ekonomi, dan politik dalam kebijakan pendidikan (Kholifah et al., 2022; Nanti & Fadriati, 2023). Untuk memastikan kelengkapan, pendekatan *chaining* digunakan, yaitu menelusuri referensi dari sumber utama untuk menemukan literatur tambahan yang relevan.

Analisis data dilakukan secara deduktif, dimulai dari kerangka teoritis umum tentang model analisis kebijakan pendidikan (rasional vs. kompleks) menuju interpretasi spesifik berdasarkan temuan literatur. Teknik analisis konten kualitatif diterapkan untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pola, dan evolusi model, dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) pengkodean awal (*coding*) untuk mengklasifikasikan data ke dalam kategori seperti dimensi sosial (Rosyada et al., 2021; Siska & Rudagi, 2021), ekonomi (Novrian et al., 2024; Edison & Andriansyah, 2023), dan politik (Nurkamiden, 2021; Kholifah et al., 2022); (2) analisis tematik untuk menyusun narasi evolusi dari model rasional (Krisna, 2020) ke kompleks (Sofiani et al., 2024; Marsari et al., 2021); dan (3) sintesis untuk menyimpulkan implikasi bagi kebijakan pendidikan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan temuan dari berbagai literatur untuk menghindari bias, sebagaimana disarankan oleh Sanusi (2024) dalam pemahaman konsep implementasi kebijakan.

Penelitian ini memastikan etika dengan mencantumkan sitasi secara akurat dan menghindari plagiarisme, serta membatasi ruang lingkup pada literatur berbahasa Indonesia dan Inggris yang relevan dengan konteks pendidikan Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Berdasarkan tinjauan literatur sistematis yang dilakukan melalui pendekatan studi pustaka, hasil penelitian ini menyajikan evolusi model-model analisis kebijakan pendidikan dari pendekatan rasional ke kompleks. Analisis deduktif dimulai dari kerangka umum model analisis kebijakan pendidikan, yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan politik sebagai faktor penentu (Yeşilbaş-Özenç, 2025), kemudian diuraikan secara spesifik berdasarkan temuan literatur. Hasil ini diorganisir secara tematik untuk menggambarkan pergeseran paradigma, dengan penekanan pada interaksi antar dimensi yang memengaruhi efektivitas kebijakan pendidikan di Indonesia.

### **Model Rasional dalam Analisis Kebijakan Pendidikan**

Model rasional menekankan pendekatan logis dan berbasis bukti, di mana keputusan kebijakan dirancang secara optimal untuk mencapai tujuan yang dapat diukur (Krisna, 2020). Dalam konteks pendidikan, model ini sering diterapkan pada perumusan kebijakan yang fokus pada efisiensi dan prediksi hasil, seperti penerapan Kurikulum 2013 yang mempertimbangkan perspektif ekonomi dan politik untuk meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS). Namun, literatur menunjukkan keterbatasan model ini, terutama dalam menghadapi ketidakmerataan akses sumber daya yang dipicu oleh faktor ekonomi, seperti di Kota Bandung dan Yogyakarta di mana belum ada kebijakan khusus untuk pelatihan pendidik (Krisna, 2020). Selain itu, penerapan algoritma prediksi status penerima bantuan pendidikan mencerminkan upaya rasional untuk mengatasi kesulitan finansial siswa, tetapi masih bergantung pada data ekonomi yang akurat (Novrian et al., 2024).

Dari perspektif sosial, model rasional cenderung mengabaikan konteks lokal, di mana kepala sekolah dan guru harus menyesuaikan kebijakan dengan dinamika masyarakat (Rosyada et al., 2021). Secara politik, model ini sering kali mencerminkan kebijakan publik yang lebih luas, seperti prioritas keselamatan selama pandemi Covid-19 daripada standar akademik (Nurkamiden, 2021). Secara keseluruhan, model rasional efektif untuk analisis teknis tetapi kurang fleksibel dalam menghadapi interaksi faktor eksternal.

### **Model Kompleks dan Teori Kompleksitas**

Pergeseran ke model kompleks menandai evolusi yang lebih dinamis, di mana kebijakan pendidikan dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor yang saling terkait, termasuk sosial, ekonomi, dan politik (Kholifah et al., 2022). Model ini mengakomodasi ketidakpastian dan adaptasi, seperti dalam desentralisasi pendidikan yang menciptakan inovasi lokal melalui otonomi daerah (Sofiani et al., 2024). Literatur menunjukkan bahwa pendekatan kompleks lebih responsif terhadap perubahan global, seperti dampak globalisasi yang memerlukan kebijakan adaptif untuk menanggapi dinamika eksternal (Nanti & Fadriati, 2023).

Dalam dimensi sosial, model kompleks menekankan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mengurangi ketimpangan, seperti aksesibilitas internet selama

pandemi yang memengaruhi pembelajaran (Siska & Rudagi, 2021; Luthfi & Septiyanti, 2023). Dari sisi ekonomi, pendekatan ini mengintegrasikan distribusi sumber daya yang adil untuk mengatasi ketimpangan, seperti pengaruh pandemi terhadap kesenjangan antara pejabat dan masyarakat (Yusrina et al., 2024; Edison & Andriansyah, 2023). Secara politik, model kompleks menganalisis dinamika kekuasaan, seperti intervensi pemerintah provinsi dalam suksesi pendidikan nasional yang sering kali melindungi kepentingan politik tertentu (Umar et al., 2024; Amin et al., 2023). Evolusi ini juga tercermin dalam model-model seperti kelembagaan, sistem, elit, dan implementasi kebijakan publik, yang semakin partisipatif dan kontekstual (Marsari et al., 2021; Sanusi, 2024).

## Temuan

Berdasarkan analisis literatur sistematis yang dilakukan, temuan penelitian ini dirangkum dalam tabel berikut untuk memperjelas perbandingan antara model rasional dan model kompleks dalam analisis kebijakan pendidikan, dengan mempertimbangkan dimensi sosial, ekonomi, dan politik. Tabel ini menggambarkan karakteristik utama, kelebihan, serta keterbatasan masing-masing model berdasarkan referensi literatur yang relevan.

Tabel 1. Temuan

Dimensi	Model Rasional	Model Kompleks
<b>Sosial</b>	Fokus pada penyesuaian kebijakan oleh pelaksana di lapangan (Rosyada et al., 2021), namun kurang responsif terhadap ketimpangan sosial seperti aksesibilitas jaringan internet selama pandemi (Siska & Rudagi, 2021).	Menekankan partisipasi masyarakat dan kewirausahaan sosial untuk memberdayakan komunitas, meningkatkan relevansi kebijakan dengan kebutuhan lokal (Moridu et al., 2023; Luthfi & Septiyanti, 2023).
<b>Ekonomi</b>	Berbasis pada prediksi dan efisiensi, seperti penggunaan algoritma untuk menentukan penerima bantuan pendidikan (Novrian et al., 2024; Krisna, 2020), tetapi sering mengabaikan ketidakmerataan sumber daya antar wilayah.	Mengintegrasikan pembangunan ekonomi inklusif untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan akses pendidikan, dengan fokus pada alokasi dana yang adil (Edison & Andriansyah, 2023; Yusrina et al., 2024).
<b>Politik</b>	Mencerminkan kebijakan publik yang lebih luas, seperti prioritas keselamatan selama pandemi Covid-19 (Nurkamiden, 2021), namun rentan terhadap pengaruh ideologi politik tertentu (Kholifah et al., 2022).	Menganalisis interaksi kekuasaan dan desentralisasi untuk menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap konteks lokal dan global (Sofiani et al., 2024; Umar et al., 2024).

Sumber: Diolah dari data yang relevan

Tabel di atas menunjukkan bahwa model rasional efektif untuk analisis teknis yang terukur, tetapi kurang fleksibel dalam menghadapi dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang kompleks. Sebaliknya, model kompleks menawarkan pendekatan yang lebih adaptif dan partisipatif, yang mampu menanggapi tantangan global dan lokal, seperti globalisasi dan ketimpangan akibat pandemi (Nanti & Fadriati, 2023; Yeşilbaş-Özenç, 2025). Temuan ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan interdisipliner dan inklusif dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

## Pembahasan

Tinjauan literatur sistematis ini mengungkapkan evolusi model analisis kebijakan pendidikan dari pendekatan rasional ke pendekatan kompleks, dengan mempertimbangkan dimensi sosial, ekonomi, dan politik yang saling berinteraksi. Temuan ini memperkuat argumen bahwa analisis kebijakan pendidikan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga

merupakan proses dinamis yang harus responsif terhadap konteks masyarakat yang kompleks (Yeşilbaş-Özenç, 2025). Pembahasan berikut menguraikan implikasi dari temuan tersebut, menghubungkan model rasional dan kompleks dengan tantangan serta peluang dalam konteks pendidikan Indonesia.

### **Model Rasional: Kelebihan dan Keterbatasan**

Model rasional, sebagaimana dijelaskan oleh Krisna (2020), menawarkan pendekatan yang logis dan berbasis bukti, yang efektif untuk merancang kebijakan dengan tujuan yang terukur, seperti penerapan Kurikulum 2013 untuk meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS). Pendekatan ini cocok untuk konteks di mana data tersedia dan tujuan kebijakan jelas, misalnya dalam penggunaan algoritma untuk memprediksi penerima bantuan pendidikan (Novrian et al., 2024). Namun, keterbatasan model ini terlihat dari kurangnya fleksibilitas dalam menanggapi ketidakmerataan sumber daya, seperti yang terjadi di Kota Bandung dan Yogyakarta, di mana akses pelatihan pendidik terhambat oleh faktor ekonomi (Krisna, 2020). Dalam dimensi sosial, model rasional sering kali gagal mengakomodasi dinamika lokal, seperti kebutuhan penyesuaian kebijakan oleh guru dan kepala sekolah (Rosyada et al., 2021). Secara politik, model ini rentan dipengaruhi oleh agenda kebijakan publik yang lebih luas, seperti fokus pada keselamatan selama pandemi Covid-19, yang kadang-kadang mengorbankan standar akademik (Nurkamiden, 2021). Kelemahan ini menunjukkan bahwa pendekatan rasional, meskipun sistematis, tidak cukup untuk menghadapi kompleksitas realitas pendidikan.

### **Model Kompleks: Responsivitas dan Partisipasi**

Sebaliknya, model kompleks menawarkan pendekatan yang lebih adaptif dan holistik, sebagaimana ditunjukkan dalam analisis desentralisasi pendidikan yang memungkinkan inovasi lokal (Sofiani et al., 2024). Model ini mengakui bahwa kebijakan pendidikan dipengaruhi oleh interaksi faktor sosial, ekonomi, dan politik yang saling terkait, seperti yang dijelaskan oleh Kholifah et al. (2022). Dalam dimensi sosial, pendekatan kompleks mendukung partisipasi masyarakat, seperti melalui kewirausahaan sosial untuk memberdayakan komunitas (Moridu et al., 2023) atau desain pembelajaran daring yang responsif terhadap ketimpangan akses internet (Luthfi & Septiyanti, 2023). Dari perspektif ekonomi, model ini mendorong alokasi sumber daya yang inklusif untuk mengurangi ketimpangan, sebagaimana diusulkan oleh Edison dan Andriansyah (2023) serta Yusrina et al. (2024), yang menyoroti dampak pandemi terhadap kesenjangan sosial-ekonomi. Dalam konteks politik, model kompleks memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap dinamika kekuasaan, seperti intervensi politik lokal yang sering kali memprioritaskan kepentingan tertentu (Umar et al., 2024; Amin et al., 2023). Pendekatan ini sejalan dengan kebutuhan akan kebijakan yang responsif terhadap tantangan global, seperti globalisasi, yang memengaruhi arah pendidikan di Indonesia (Nanti & Fadriati, 2023).

### **Implikasi untuk Kebijakan Pendidikan di Indonesia**

Evolusi dari model rasional ke kompleks mencerminkan kebutuhan akan pendekatan analisis kebijakan yang lebih interdisipliner dan partisipatif. Literatur menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan yang efektif harus berbasis pada prinsip keadilan sosial, kesetaraan, dan etika, serta bebas dari pengaruh ideologi politik yang bias (Yeşilbaş-Özenç, 2025; Kusnadi & Wulandari, 2024). Pendekatan kompleks mendukung keterlibatan pemangku kepentingan, seperti yang ditekankan oleh Marsari et al. (2021), yang menyoroti pentingnya

model partisipatif dalam perumusan kebijakan. Namun, tantangan tetap ada, seperti rendahnya komunikasi antar pemangku kepentingan (Nani, 2021) atau kurangnya pemahaman siswa terhadap kebijakan (Lallo et al., 2021). Untuk mengatasi ini, solusi yang diusulkan meliputi pengembangan mekanisme komunikasi yang lebih baik, pelatihan pendidik untuk menghadapi dinamika global (Nanti & Fadriati, 2023), serta perencanaan berbasis data (Mubin, 2020).

### **Relevansi dengan Konteks Indonesia**

Dalam konteks Indonesia, model kompleks lebih relevan karena mampu menanggapi keragaman sosial, ekonomi, dan politik di berbagai wilayah. Misalnya, desentralisasi pendidikan memungkinkan daerah untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan lokal, seperti yang terlihat pada pendekatan berbasis komunitas di Papua (Atek & Belolon, 2024). Namun, model ini memerlukan legitimasi dan komunikasi yang kuat untuk menghindari kesalahpahaman (Kholifah et al., 2022). Selain itu, integrasi perspektif pedagogi kritis, seperti yang diusulkan oleh Fitramadhana (2022) dan Siswadi (2023), dapat memperkaya analisis dengan mempertimbangkan narasi terpinggirkan dan mendorong keadilan sosial dalam pendidikan.

Secara keseluruhan, transisi ke model kompleks menunjukkan bahwa analisis kebijakan pendidikan harus melampaui pendekatan teknis dan linier, menuju pendekatan yang adaptif dan inklusif. Temuan ini memperkuat argumen bahwa kebijakan pendidikan yang efektif di Indonesia harus mempertimbangkan konteks lokal dan global secara holistik, dengan melibatkan pemangku kepentingan untuk menciptakan sistem pendidikan yang berkeadilan dan responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan politik.

### **Kesimpulan dan Saran**

#### **Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa analisis kebijakan pendidikan telah berevolusi dari pendekatan rasional yang berfokus pada logika dan efisiensi menuju pendekatan kompleks yang lebih dinamis dan responsif terhadap interaksi faktor sosial, ekonomi, dan politik. Model rasional efektif untuk merancang kebijakan dengan tujuan terukur, namun terbatas dalam menghadapi ketidakmerataan sumber daya dan dinamika lokal. Sebaliknya, model kompleks menawarkan fleksibilitas dengan mengintegrasikan partisipasi masyarakat, alokasi sumber daya yang inklusif, dan analisis dinamika kekuasaan, sehingga lebih relevan untuk konteks Indonesia yang beragam. Pendekatan ini memungkinkan kebijakan pendidikan yang adaptif terhadap tantangan global seperti globalisasi dan pandemi, serta kebutuhan lokal seperti desentralisasi pendidikan. Dengan demikian, analisis kebijakan pendidikan yang holistik dan interdisipliner menjadi kunci untuk menciptakan sistem pendidikan yang berkeadilan dan efektif.

#### **Saran**

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pendidikan di Indonesia, disarankan agar pembuat kebijakan mengadopsi pendekatan kompleks yang melibatkan partisipasi aktif pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pendidik, dan pemerintah daerah. Perlu dikembangkan mekanisme komunikasi yang lebih baik untuk memastikan pemahaman dan dukungan terhadap kebijakan. Selain itu, alokasi dana pendidikan harus diprioritaskan untuk mengurangi ketimpangan akses, terutama di wilayah tertinggal. Pelatihan pendidik juga perlu

ditingkatkan untuk menghadapi dinamika global dan lokal, serta didukung oleh perencanaan berbasis data yang transparan. Akhirnya, integrasi prinsip keadilan sosial dan pendekatan pedagogi kritis dapat memperkuat kebijakan pendidikan agar lebih inklusif dan mendorong perubahan sosial yang positif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amin, K., Sari, A. K., & Sirozi, M. (2023). Kelompok Kepentingan (Interest Group) Dalam Dinamika Politik Pendidikan Islam Di Indonesia. *Mawa Izh Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*. doi:10.32923/tarbawy.v10i2.3671
- Assyakurrohim, D., Ikham, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*. doi:10.47709/jpsk.v3i01.1951
- Atek, L. G., & Belolon, H. K. (2024). Transformasi Pendidikan Di Tanah Papua: Analisis Kebijakan Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme Dan Kamoro. *Edusaintek Jurnal Pendidikan Sains Dan Teknologi*. doi:10.47668/edusaintek.v11i2.1163
- Brugha, R. (2000). Stakeholder Analysis: A Review. *Health Policy and Planning*. doi:10.1093/heapol/15.3.239
- Edison, E., & Andriansyah, M. (2023). Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Sosial: Tinjauan Terhadap Kebijakan Pembangunan Di Indonesia. *Journal Development*. doi:10.53978/jd.v11i2.323
- Fitramadhana, R. (2022). Pemikiran Pedagogi Kritis Henry Giroux. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*. doi:10.22146/jps.v9i1.72188
- Kholifah, E. P., Setiawan, F., & Fitri, N. L. (2022). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Al-Muaddib Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*. doi:10.46773/muaddib.v4i2.362
- Krisna, F. N. (2020). Higher Order Thinking Skills Learning Policy in K-2013: Economic and Political Perspectives. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*. doi:10.24832/jpnk.v5i1.1513
- Kurniawan, D., & Riswanto, A. (2023). Perubahan Pendidikan Sosial Memaknai Lahirnya Produk Hukum Baru. *Jurnal Konseling Pendidikan Islam*. doi:10.32806/jkpi.v4i1.301
- Luthfi, M. I., & Septiyanti, N. D. (2023). Design Thinking Untuk Analisis Masalah Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Decode Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*. doi:10.51454/decode.v3i2.146
- Marsari, H., Hairani, S., & Gistituati, N. (2021). Model Perumusan Kebijakan Pendidikan. *Jrti (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*. doi:10.29210/3003908000
- Moridu, I., Doloan, A., Fitriani, F., Posumah, N. H., Hadiyati, R., Kune, D., & Yadasang, R. M. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Inovasi Sosial Dan Kewirausahaan Sosial Dalam Menangani Masalah Sosial. *Eastasouth Journal of Effective Community Services*. doi:10.58812/ejecs.v2i01.143
- Nanti, S., & Fadriati, F. (2023). Analisis Dampak Globalisasi Sebagai Dasar Penentuan Arah Kebijakan Pendidikan Di Sekolah. *Equilibrium Jurnal Pendidikan*. doi:10.26618/equilibrium.v11i2.9667

- Novrian, R., Agustiani, T., Fikri, M., Hikmatulloh, M. F., Gunawan, M. E., & Firdaus, U. (2024). Penerapan Algoritma Random Forest Dalam Prediksi Status Penerima PIP Pada Siswa: Studi Kasus Pada SMK Amaliah 1. *Karimahtauhid*. doi:10.30997/karimahtauhid.v3i2.11937
- Nurkamiden, U. D. (2021). Kebijakan Pendidikan Di Indonesia Era Pandemi Covid-19. *Tadbir Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. doi:10.30603/tjmpi.v9i2.2264
- Rosyada, I., Sanuhung, F., Rimadhani, M. I., & Hakim, M. A. (2021). Analisis Pendidikan: Kebijakan Pendidikan Perspektif Nasional Dan Madrasah. *Edification Journal*. doi:10.37092/ej.v4i1.293
- Sanusi, I. (2024). Implementasi Kebijakan Pendidikan (Hakikat, Pendekatan, Strategi, Model, Tahapan, Dan Faktor Yang Memengaruhi). *Idarotuna*. doi:10.29313/idarotuna.v1i1.3823
- Siska, F., & Rudagi, R. (2021). Analisis Ketimpangan Pendidikan Pada Masa Covid-19 Di Nagari Sisawah Kabupaten Sijunjung. *Al Ma Arief Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya*. doi:10.35905/almaarief.v3i1.2032
- Siswadi, G. A. (2023). Telaah Atas Pemikiran Henry Armand Giroux Tentang Pedagogi Kritis Dan Relevansinya Dengan Pengembangan Sistem Pendidikan Di Indonesia. *Maha Widya Bhuwana Jurnal Pendidikan Agama Dan Budaya*. doi:10.55115/bhuwana.v6i1.2796
- Sofiani, N., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Wahyuni, Y. S. (2024). Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Serta Implementasi Dalam Pendidikan Di Indonesia. *Menara Ilmu*. doi:10.31869/mi.v18i1.5273
- Sulistiyarningsih, R., & Handayani, M. M. (2022). Analisis Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Berdasarkan Index for Inclusion. *Happiness Journal of Psychology and Islamic Science*. doi:10.30762/happiness.v2i2.341
- Umar, A. R., Sirozi, M., & Sumanti, S. T. (2024). Suksesi Pendidikan Nasional (Analisis Intervensi Politik Pemerintah Provinsi). *Ideguru Jurnal Karya Ilmiah Guru*. doi:10.51169/ideguru.v9i3.1328
- Yeşilbaş-Özenç, Y. (2025). Eğitimde politika analizi: Kavramsal temeller ve uygulama yaklaşımları. *Okul Yönetimi Dergisi*, 5(1), 34–48.
- Yusrina, K. M., Maharani, M., Aliffah, N. U., & Ratmaningsih, N. (2024). Budaya Korupsi: Ketimpangan Sosial Ekonomi Antar Pejabat Negara Dan Masyarakat Akibat Pandemi. *Jurnal Sosial Dan Sains*. doi:10.59188/jurnalsosains.v3i12.1158